

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Handoko, Widhi. (2014), *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Harsono, Budi. (1999). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*. Jakarta : Djambatan Boedi.
- Mannad, Abdul. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf
- Mertokusumo, Sudikno. (1998). *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. (2008). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung : Mandar Maju.
- Muhammad, Abdulkadir, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Ngadino. (2019). *Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notarus di Indonesia*. Semarang : UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press
- (2020). *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press
- R Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S, (2016), *Teknik Pembuatan Akta Satu : Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Santoso, Urip. (2005). *Hukum Agraria & Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta : Kencana Prenada Meida Group.
- (2017). *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif, cetakan ke-6*. Jakarta: Kencana.
- (2019). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, cetakan ke-6*. Jakarta Timur: Kencana
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

- Soerodjo, Irawan. (2002). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya : Arkola.
- Sumarja, FX. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sutedi, Adrian. (2006). *Ketentuan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Jakarta : Cipta Jaya.
- (2018). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, cet.9. Jakarta : Sinar Grafika
- Suteki, & Taufani, Galang. (2020) *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, cetakan ke-3. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, (2016) *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : Andi Offset,
- Victor Situmorang dan Cornentyna Sitanggang, (1991). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

**JURNAL :**

- Asshiddiqie , Jimly. *Penegakan Hukum*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum/](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum/)
- Auri. *Aspek Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal*. Jurnal Ilm Hukum Legal Opinion. Edisi I Volume 2, 2014.
- Fitriani, Rahma, “*Pemilikan Tanah dalam Perspektif Islam*” dalam Al Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 2, Nomor 1 .2011. <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/AlMabsut/article/view/44>
- Imam Surya Saputra, 2020, *Akibat Hukum Adanya Penyalahgunaan Keadaan Pada Perjanjian Jual Beli Tanah Di Banda Aceh*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 Issue. 2, August 2020, E-ISSN 2477-815X, P-ISSN 2303-3827.
- Khairina, “*Sertifikat Cacat Hukum dalam Hukum Pertanahan di Indonesia*” dalam Media Neliti, Juris Volume 13, Nomor 1 (Juni 2014),

<https://media.neliti.com/media/publications/270148-sertifikat-cacat-hukum-dalam-hukum-perta-ff1b4b3e.pdf>

Luthvi Febrika Nola, “*Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*”, dalam **Negara Hukum : Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan**, Volume 7 No 1, Juni 2016, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>

Rompis, Tonny, “*Kajian Sosiologi Hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*” dalam *Lex Crimen*, Vol.IV/No.8/Okt/2015, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888/>

Zulhadji, Ardiansyah. *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*. *Lex Crimen*. Vol.V/No.a/April-Jun/2016

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

6. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
10. Peraturan Kepala BPN RI No 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.